

## DPR setuju dana Kemenkop

Written by Sahnun

Monday, 03 August 2009 09:52 - Last Updated Tuesday, 04 August 2009 10:06

---

JAKARTA Komisi VI DPR menyetujui usulan pengajuan dana APBN-P 2009 oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM sekitar Rp211 miliar untuk enam program pada bidang instansi tersebut.

Toto Daryanto, Ketua Komisi VI DPR, menyatakan persetujuan tersebut dalam rapat kerja antara komisi yang dia pimpin langsung bersama dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, pekan lalu.

"Kesimpulannya, Komisi VI akan memperjuangkan penambahan APBN-P Kementerian Ko-perasi dan UKM. Tentu saja melalui anggota yang masuk dalam panitia anggaran DPR. Setelah jumlahnya keluar, akan kita bahas lagi," ujar Toto Daryanto, usai raker tersebut.

Perjuangan itu akan didelegasikan kepada para anggota Komisi VI yang masuk dalam panitia anggaran DPR, a.l. Hamzah Sangadji (F-PG) dan Zainut Tauhid Saad dari F-PPP.

Prinsip kerja pengajuan anggaran tersebut, kata Toto, berada di bawah mekanisme Komisi VI. Keputusan diterima atau tidak pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-. P) 2009 diputuskan hari ini 3 Agustus.

Menurut dia, besaran yang diajukan Kementerian Koperasi tidak ada masalah jika peruntukannya jelas bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan secara merata.

Selain itu, Toto juga meminta agar penyerahan bantuan bagi UMKM jangan mubazir. Bantuan yang diberikan instansi lain, seperti alat-alat misalnya, sering tidak bisa dipergunakan.

"Saya melihat di satu daerah penerima bantuan, yakni perajin perak, tidak bisa menggunakan peralatan yang diterima. Permasalahannya ternyata pada kapasitas listrik alat yang jauh di atas kemampuan beban mereka," ungkap Toto.

### Maksimalkan APBN-P

Komisi VI sempat mempertanyakan kemampuan instansi tersebut memaksimalkan dana APBN-P, karena realisasi anggaran pada tahun ini baru mencapai 26.6% dari sekitar Rp749,76 miliar.

Akan tetapi Suryadharma optimistis sisa anggaran instansinya bisa terserap seluruhnya pada Desember tahun ini. Keterlambatan realisasi anggaran, katanya, karena serikat terjadi revisi.

"Hal itu membuat kami baru melakukan realisasi anggaran mulai pada Juli 2009. Kami mempunyai keyakinan, hingga Desember seluruh anggaran terserap, termasuk dana APBN-P," tu-kas Suryadharma Ali. Menurut dia, pengajuan dana APBN-P dilakukan berdasarkan perhitungan kemampuan yang dimiliki jajarannya untuk memberdayakan pelaku

Sumber : Bisnis Indonesia